

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI DI
ERA MODERN INDONESIAMario Jonathan Kusuma, Ibthisam Luthfi Rahman, Muhammad Wildanu Rabbani,
Muhammad Zulfi Suryafalah, Nazila Rachma Ramadhani

Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Pradita

Email: mario.jonathan@student.pradita.ac.id, ibthisam.luthfi@student.pradita.ac.id,
muhammad.wildanu@student.pradita.ac.id, muhammad.zulfi@student.pradita.ac.id,
nazila.rachma@student.pradita.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of Pancasila values as a strategy to enhance interfaith tolerance in Indonesia within the modern era, characterized by globalization and digital technology. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through literature review and social observations. The findings reveal that despite being the state ideology, the application of Pancasila continues to face challenges, including religious radicalism, misinformation on social media, and weak public literacy regarding Pancasila values. The study highlights the crucial role of education in internalizing Pancasila values from an early age, particularly through curricula that emphasize tolerance and unity. Additionally, active participation by communities, interfaith organizations, and the use of social media as platforms for disseminating messages of peace is essential for fostering harmonious relationships. However, major obstacles such as the politicization of religion and inconsistent enforcement of laws against intolerance were also identified. As a solution, the study also recommends strengthening character education based on Pancasila, public campaigns on tolerance, and collaboration among governments, communities, and religious leaders. With a comprehensive strategy, implementing Pancasila values can serve as a robust foundation for building a tolerant and harmonious nation.

Keywords: Pancasila, tolerance, religion, education, social media.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai strategi untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama di Indonesia dalam era modern yang ditandai oleh globalisasi dan teknologi digital. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Pancasila telah menjadi ideologi negara, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti radikalisme keagamaan, disinformasi melalui media sosial, dan lemahnya literasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berperan sentral dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sejak dini, terutama melalui kurikulum yang menekankan toleransi dan kerukunan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, organisasi lintas agama, dan pemanfaatan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan pesan-pesan damai sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan besar, termasuk politisasi agama dan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

terhadap kasus intoleransi. Sebagai solusi, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, kampanye publik tentang toleransi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama juga direkomendasikan. Dengan strategi yang menyeluruh, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun bangsa yang toleran dan harmonis.

Kata Kunci: Pancasila, toleransi, agama, pendidikan, media sosial.

1. LATAR BELAKANG

1.1 Permasalahan Penelitian

Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun Pancasila telah lama dijadikan landasan ideologi negara untuk menguatkan persatuan dalam keberagaman, kenyataannya konflik antar agama masih sering terjadi. Salah satu permasalahan yang mendasari hal ini adalah meningkatnya intoleransi di ruang publik, yang diperparah oleh penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks penerapan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar sebagai ideologi negara melainkan juga dapat menjadi landasan nilai dan paradigma dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia (Mukhlis dan Febri, 2016:185). Dinamika sosial dan politik turut mempengaruhi hubungan antar umat beragama, membuat situasi semakin kompleks. Oleh karena itu, muncul pertanyaan utama mengenai bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara lebih efektif sebagai strategi untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di tengah tantangan-tantangan era modern ini.

1.2 Wawasan dan Rencana Pemecahan Masalah

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki potensi besar dalam memelihara kerukunan dan toleransi di tengah masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila memberikan panduan moral dan etika yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk intoleransi agama. Namun, Tidak dipungkiri bahwa dalam ranah praktis kehidupan masyarakat Indonesia masih ditemukan respons pro-kontra di kalangan umat beragama atas eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zainal dkk., 2021:107).

Pemecahan masalah ini dapat ditempuh melalui beberapa strategi. Menurut Kopong dan Kristoforus (2021:10), fenomena pro-kontra terhadap moderasi beragama di Indonesia, baik melalui media offline maupun online perlu disikapi secara bijak, yakni dengan memberikan bentuk kesadaran sekaligus pemahaman bersama tentang ajaran agama dengan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, harus memberikan penekanan lebih besar pada pentingnya toleransi dan penerimaan perbedaan, dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Pemanfaatan teknologi digital secara positif harus menjadi fokus dalam mengatasi penyebaran informasi yang bersifat intoleran. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama perlu bekerja sama untuk menciptakan konten yang edukatif, membangun kesadaran kritis, serta menyebarkan narasi-narasi perdamaian dan persatuan di media sosial. Selain itu, dialog antar umat beragama harus diperluas, baik dalam bentuk forum diskusi terbuka, seminar, maupun kegiatan lintas agama di tingkat komunitas. Hal

ini akan membantu memperkuat interaksi dan kerja sama antar kelompok agama, serta memecah sekat-sekat perbedaan yang sering kali menjadi sumber konflik.

1.3 Rumusan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif sebagai strategi peningkatan toleransi antar umat beragama di era modern Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berusaha untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Pancasila, terutama yang terkait dengan kerukunan dan persatuan, telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang beragam secara agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan Pancasila dalam memperkuat toleransi, serta mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendorong kerukunan antar agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi strategis yang relevan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi Pancasila sebagai panduan moral dan sosial di tengah tantangan era modern, termasuk dalam mengatasi isu intoleransi yang semakin berkembang.

1.4 Rangkuman Kajian Teoritik

Pemahaman tentang implementasi sebagai sebuah proses dinamis melibatkan interaksi antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Rosad (2019:176), implementasi tidak hanya sebatas penerapan ide atau kebijakan, tetapi juga melibatkan jaringan birokrasi yang efektif untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, penerapan Pancasila sebagai strategi untuk meningkatkan toleransi beragama di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya yang melibatkan berbagai elemen, baik dari aspek kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan, maupun peran masyarakat luas.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuliani dkk. (2021:60), mencerminkan nilai-nilai yang mendukung persatuan dalam keberagaman. Sila-sila dalam Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam konteks keberagaman agama. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pendekatan yang nyata dan sistematis, terutama dalam menghadapi tantangan di era modern.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, mencakup jurnal, buku, artikel online, dan sumber-sumber relevan lainnya. Menurut Sugiyono (2016:213), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat tertentu untuk mempelajari situasi ilmiah (eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif, serta lebih menitikberatkan pada pemaknaan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi terhadap tingkah laku masyarakat untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan dapat diandalkan terkait peran Pancasila dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan di era modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pancasila sebagai strategi untuk meningkatkan toleransi menjadi semakin penting di era modern, di mana interaksi antarwarga negara Indonesia semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, serta arus globalisasi yang cepat. Menurut Ismail (2014:6), prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan. Berbagai permasalahan seperti intoleransi, radikalisasi keagamaan, dan konflik sosial sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek toleransi. Untuk itu, bab ini akan membahas secara mendalam mengenai implementasi Pancasila dalam toleransi, peran pendidikan, keterlibatan masyarakat, tantangan yang dihadapi, dampak dari penerapannya, serta solusi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.1 Analisis Implementasi Pancasila dalam Konteks Toleransi

Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi landasan bagi toleransi antarumat beragama di Indonesia. Meski nilai-nilai Pancasila diakui secara teoritis, penerapannya dalam konteks toleransi sering menghadapi kendala. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih menuai pro-kontra antarumat beragama (Zainal dkk., 2021:107), baik di tingkat nasional maupun lokal, mencerminkan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Pengaruh radikalisme keagamaan dan ekstremisme menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi ini. Kelompok ekstrem menggunakan narasi agama untuk memicu konflik dan memecah belah masyarakat, terutama di era digital dengan penyebaran informasi yang masif melalui media sosial. Ujaran kebencian sering kali memperburuk situasi, menciptakan ketegangan antaragama.

Pemerintah telah berusaha menjaga Pancasila sebagai dasar penyusunan kebijakan publik, namun inkonsistensi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menjadi tantangan besar. Beberapa wilayah di Indonesia telah berhasil melakukan dialog antaragama yang menunjukkan bagaimana Pancasila dapat diterapkan untuk menjaga kerukunan. Menurut Yulianti (2021:62), penanaman nilai-nilai tersebut merupakan aspek penting untuk memastikan persatuan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Namun, masih banyak daerah lain yang menghadapi kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, terutama terkait kebebasan beragama.

Secara keseluruhan, penerapan Pancasila dalam konteks toleransi membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak. Kesadaran akan pentingnya toleransi harus terus ditanamkan melalui pendidikan, dialog lintas agama, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Kesadaran ini menjadi dorongan dalam membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta demi mencapai kebahagiaan melalui upaya yang tekun, serta dapat diwujudkan dalam sikap hidup yang harmonis, penuh toleransi, dan damai (Nurgiansah dan Muchtar, 2018:673).

3.2 Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Toleransi

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat yang toleran, terutama di negara yang sangat beragam seperti Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa, sudah sepatutnya menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Sila pertama, menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan agama. Dengan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila,

khususnya dalam konteks toleransi, generasi muda dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberagaman dan pentingnya menghormati perbedaan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah memasukkan Pancasila ke dalam kurikulum nasional sejak dini. Menurut Fatolosa (2019:115) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang menyajikan berbagai pengalaman belajar, dan berperan dalam membentuk keseluruhan karakter warga negara agar dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam organisasi sosial. Namun, tantangannya adalah bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut bisa berjalan efektif dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar teori di dalam kelas. Banyak sekolah yang menjadikan PPKn sebagai mata pelajaran yang cenderung bersifat hafalan, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak diinternalisasi dengan baik oleh para siswa.

Untuk memperbaiki situasi ini, perlu adanya pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual dalam mengajarkan Pancasila, terutama terkait isu toleransi. Pendekatan pendidikan yang mempromosikan pemahaman lintas agama, misalnya melalui diskusi atau simulasi kasus tentang konflik agama, dapat membantu siswa memahami pentingnya toleransi secara lebih nyata. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek yang mengajak siswa terlibat dalam kegiatan lintas agama dan budaya juga dapat memperkuat pemahaman mereka tentang keberagaman di masyarakat Indonesia.

Peran guru dalam mendidik toleransi juga sangat penting. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan bagi para siswa. Guru yang mampu menunjukkan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan pengaruh positif yang kuat bagi siswa. Di sisi lain, kebijakan pendidikan juga harus mendukung terciptanya ruang-ruang diskusi yang inklusif dan tidak diskriminatif. Sistem pendidikan yang adil dan merata, sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang harmonis. Siswa dari semua latar belakang agama harus merasa nyaman dan dihargai di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan sikap toleransi sejak dini.

Diskusi mengenai multikulturalisme dan pendidikan toleransi mulai marak di kalangan akademisi, praktisi budaya, dan aktivis di Indonesia pada awal tahun 2000 (Mahfud, 2010:108). Program-program yang melibatkan masyarakat, seperti lokakarya lintas agama dan pelatihan tentang Pancasila bagi para pemimpin komunitas, dapat membantu menyebarkan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat yang lebih luas. Hal ini penting, mengingat banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di tingkat masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai.

3.3 Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi dalam Penerapan Pancasila

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial. Jika keragaman ini dipelihara dan dijaga dengan baik, maka akan menjadi anugerah yang mampu mendorong kreativitas bangsa, memperkaya intelektual, serta mengembangkan sikap-sikap toleran (Hatimah, 2008:7.1). Oleh karena itu, keterlibatan langsung masyarakat dan organisasi sangat diperlukan untuk menciptakan iklim sosial yang toleran dan inklusif.

Banyak komunitas lokal yang menyelenggarakan kegiatan lintas agama, seperti dialog antaragama, kerja bakti lintas komunitas, atau perayaan bersama hari-hari besar keagamaan.

Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial antarwarga, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang pentingnya saling menghargai perbedaan. Menurut Tutiasri dan Ririn (2016:88), faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antar kelompok adalah faktor personal, di mana peran setiap anggota kelompok sangat penting dalam memberikan masukan untuk memecahkan masalah. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, komunitas masyarakat Muslim dan Kristen sering mengadakan kerja bakti bersama atau merayakan peringatan hari-hari besar keagamaan bersama-sama. Hal ini menciptakan suasana harmonis dan meneguhkan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila.

Selain komunitas lokal, peran organisasi masyarakat sipil (OMS) juga sangat signifikan. Ismail (2014:138) menyebutkan organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan berbagai lembaga lintas agama lainnya, telah berperan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam toleransi beragama. Organisasi ini aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dialog antaragama, mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan, serta berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik agama yang terjadi di beberapa daerah.

Peran media sosial dalam menyebarkan pesan-pesan positif tentang Pancasila juga tidak bisa diabaikan. Di era digital ini, platform media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal telah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal toleransi beragama. Kampanye-kampanye online yang berisi pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan kebersamaan sering kali viral dan mampu mencapai audiens yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun sering menjadi platform untuk menyebarkan ujaran kebencian, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai positif.

Namun, di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan organisasi dalam penerapan Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah disinformasi dan penyebaran narasi intoleransi, terutama melalui media sosial. Banyak masyarakat yang terpapar oleh konten-konten yang memprovokasi kebencian antaragama. Oleh karena itu, peran organisasi masyarakat dan komunitas lokal sangat penting dalam melawan narasi-narasi negatif ini. Dengan menyebarkan informasi yang akurat dan membangun, organisasi-organisasi ini dapat membantu meluruskan pemahaman masyarakat dan memperkuat kesadaran akan pentingnya toleransi.

Selain itu, faktor politik juga kerap mempengaruhi penerapan Pancasila di tengah masyarakat. Ada kalanya, politisasi agama terjadi dalam kontestasi politik, yang kemudian memecah belah masyarakat berdasarkan identitas agama. Untuk menghadapi tantangan ini, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi pentingnya menjaga netralitas agama dalam politik sangatlah penting. Ismail (2014:111) menjelaskan bahwa dialog antara pemuka agama, elit politik, dan kalangan pers bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama tentang pemberdayaan politik yang baik, sehingga radikalisme politik yang dapat mengganggu harmoni umat beragama dan merugikan kepentingan bangsa dapat dihindari.

3.4 Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pancasila

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Pancasila adalah radikalisasi keagamaan dan penyebaran ideologi ekstremis yang bertentangan dengan nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh

Pancasila (Saifudin, 2019:121). Radikalisasi ini sering kali memanfaatkan celah pendidikan dan sosial-ekonomi, di mana kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan mudah terpengaruh oleh narasi-narasi ekstremis yang menawarkan solusi sederhana terhadap masalah-masalah kompleks yang mereka hadapi (Saifudin, 2019:130). Ini adalah ancaman nyata bagi penerapan sila pertama Pancasila yang menekankan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menghormati kebebasan beragama.

Tantangan lain yang sangat signifikan adalah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, terutama melalui media sosial (Gumgum dkk., 2017:37). Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, baik informasi yang benar maupun yang salah. Penyebaran berita palsu atau hoaks yang berkaitan dengan isu-isu agama kerap kali memperburuk ketegangan sosial. Narasi intoleransi beragama sering disebarkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memprovokasi konflik atau mempengaruhi opini publik. Sebagai negara dengan masyarakat yang sangat pluralistik, Indonesia sangat rentan terhadap konflik berbasis agama jika disinformasi ini tidak diatasi dengan segera. Tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan (Gumgum dkk., 2017:39).

Faktor politik juga menjadi hambatan dalam penerapan Pancasila. Politisasi agama dalam kontestasi politik sering kali memecah belah masyarakat berdasarkan identitas keagamaan. Fenomena ini terlihat jelas selama beberapa tahun terakhir, di mana beberapa aktor politik menggunakan agama sebagai alat untuk meraih dukungan massa, yang pada gilirannya memicu polarisasi dan intoleransi di kalangan masyarakat. Dalam jangka panjang, politisasi agama ini dapat merusak harmoni sosial dan menghambat penerapan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, tantangan politik ini harus diatasi dengan memperkuat komitmen pada netralitas agama dalam politik serta menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara.

Hambatan lain yang cukup krusial adalah pengaruh globalisasi yang membawa masuk berbagai nilai dan budaya asing ke Indonesia. Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia terpapar pada berbagai nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks kebebasan individu yang sering disalahartikan. Nilai-nilai kebebasan dan individualisme dari negara-negara Barat, misalnya, terkadang tidak selaras dengan konsep kebersamaan dan gotong royong yang merupakan inti dari Pancasila. Hal ini sering kali menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang lebih mengadopsi nilai-nilai modern dengan kelompok yang lebih tradisional. Dalam konteks ini, globalisasi dapat menjadi hambatan dalam penerapan Pancasila jika tidak dihadapi dengan kebijakan yang bijaksana.

3.5 Dampak Penerapan Pancasila terhadap Toleransi Beragama

Secara umum, di daerah di mana nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten, terlihat peningkatan dalam hal kerukunan antar umat beragama. Sebagai contoh, Yogyakarta, dikenal sebagai daerah dengan penduduk yang sangat pluralistik, penerapan nilai-nilai Pancasila telah memberikan dasar kuat untuk menjaga harmoni antaragama. Yogyakarta, dengan masyarakat yang multikultural, menunjukkan contoh nyata bagaimana prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurainun dan Vita (2019:92), kekuatan toleransi tersebut didasarkan pada pandangan para leluhur mengenai Ketuhanan Semesta bagi

umat manusia yang beragam, meskipun berasal dari satu keturunan dan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu kerukunan, keteraturan, keseimbangan, dan kedamaian.

Salah satu dampak positif yang terlihat dari penerapan Pancasila adalah adanya berbagai inisiatif untuk mendorong dialog antaragama di tingkat lokal. Di beberapa daerah, forum dialog antaragama menjadi sarana efektif untuk mencegah konflik dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama. Penerapan sila pertama dalam bentuk dialog yang terbuka dan konstruktif ini tidak hanya membantu mencegah konflik tetapi juga memperkuat pemahaman dan kerjasama antarumat beragama. Mokodenseho dan Wekke (2017:68) memandang toleransi mencakup aspek perdamaian, menghargai perbedaan dan individu, serta kesadaran, di mana individu yang toleran membiarkan dan mengizinkan orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, serta menghargai asal usul dan latar belakang masing-masing.

Selain itu, media sosial juga memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi dampak penerapan Pancasila terhadap toleransi beragama. Di era digital ini, narasi intoleransi beragama sering kali disebarkan melalui platform media sosial, memperburuk hubungan antarumat beragama. Dalam beberapa kasus, media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau ujaran kebencian yang berbasis agama, yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Liliweri (2007:19) bahkan menyebutkan bahwa salah satu perspektif komunikasi antarbudaya menekankan bahwa tujuan komunikasi antarbudaya adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang orang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan digital juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan serius.

Dampak penerapan Pancasila terhadap toleransi beragama di Indonesia bervariasi tergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, penerapan Pancasila berhasil menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis. Namun, di daerah lain, ketegangan antarumat beragama masih sering terjadi, menunjukkan bahwa penerapan Pancasila masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dampak positif dari penerapan Pancasila terhadap toleransi beragama, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, dan penggunaan teknologi.

3.6 Solusi untuk Meningkatkan Toleransi Melalui Pancasila

Untuk memperkuat penerapan Pancasila sebagai strategi peningkatan toleransi di Indonesia, diperlukan berbagai langkah yang melibatkan beberapa lapisan masyarakat dan pemerintah. Solusi yang diusulkan dalam sub-bab ini tidak hanya berfokus pada penguatan kebijakan, tetapi juga mencakup pendekatan praktis dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis.

Pertama, kurikulum sekolah harus lebih menekankan pengajaran Pancasila, terutama terkait toleransi antaragama dan penghargaan terhadap perbedaan. Karena menurut Saiful dan Andy (2018:55), faktor yang menghambat implementasi nilai toleransi di sekolah adalah latar belakang siswa yang beragam, rendahnya kesadaran diri akan pentingnya toleransi, sikap pasif atau acuh tak acuh, serta pengaruh teman sebaya. Maka, pengajaran ini harus dilengkapi dengan proyek kolaboratif antar siswa dari berbagai latar belakang untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi.

Kedua, kampanye publik tentang pentingnya Pancasila harus ditingkatkan. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa bekerja sama dalam mengadakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi. Ini harus melibatkan media massa dan tokoh masyarakat agar pesannya lebih efektif.

Ketiga, regulasi yang mendukung kebebasan beragama harus ditegakkan dengan konsisten. Pemerintah perlu tegas dalam menangani kasus-kasus intoleransi dan menjamin hak warga negara untuk menjalankan ibadah tanpa diskriminasi. Karena secara konstitusional, Ketuhanan adalah refleksi dari keagamaan bangsa Indonesia yang majemuk dan multikultural (Nurainun, 2019:91).

Keempat, penggunaan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan narasi positif tentang Pancasila dan toleransi sangat penting. Kampanye digital yang edukatif dan menarik harus terus digencarkan untuk melawan ujaran kebencian.

Kelima, dialog antaragama harus terus didorong untuk memperdalam pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman. Liliweri (2011:257) menyatakan bahwa dialog berfungsi sebagai penghubung komunikasi antaragama. Forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok agama bisa menjadi jembatan untuk menciptakan kerukunan.

Terakhir, seluruh masyarakat harus terlibat aktif dalam mengamalkan Pancasila. Kegiatan sosial yang melibatkan lintas agama dan budaya dapat memperkuat solidaritas antarwarga, memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila, dan mencegah konflik berbasis perbedaan.

4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila sebagai strategi peningkatan toleransi antarumat beragama di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, terutama di era modern. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang menekankan pada "Ketuhanan Yang Maha Esa," menyediakan fondasi moral dan etika yang kuat dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila telah menjadi ideologi dasar negara, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih memiliki sejumlah kendala, termasuk radikalisasi keagamaan, disinformasi, dan sikap intoleran yang berkembang di kalangan masyarakat.

Pendidikan formal dan non-formal berperan signifikan dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Solusi untuk memperkuat kurikulum pendidikan yang mengedepankan toleransi dan kerukunan beragama sangatlah relevan. Selain itu, keterlibatan masyarakat, baik melalui inisiatif komunitas maupun penggunaan teknologi digital, juga dapat menjadi pendorong utama dalam menyebarkan pesan toleransi. Penegakan hukum yang adil dan kebijakan yang mendukung kebebasan beragama menjadi langkah-langkah kritis yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan intoleransi yang masih ada.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, terlihat bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga kerukunan antarumat beragama dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

5. SARAN

Melalui hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga pendidikan segera memperkuat kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila serta toleransi beragama, melalui pelatihan untuk guru dan pengadaan materi ajar yang relevan, sambil mendorong inisiatif komunitas untuk menciptakan ruang dialog antarumat beragama, seperti forum diskusi dan kegiatan sosial. Selain itu, penting untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital dalam menyebarkan pesan toleransi, serta memperkuat penegakan hukum terhadap praktik intoleransi dan diskriminasi, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan agama mereka. Kebijakan yang inklusif dalam memberikan izin pendirian tempat ibadah bagi semua agama juga sangat diperlukan, bersama dengan penelitian lebih lanjut yang fokus pada daerah-daerah dengan masalah intoleransi tinggi untuk mengidentifikasi langkah-langkah efektif dalam meningkatkan penerapan Pancasila dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukhlis, Febri Hijroh. 2016. Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama. *Fikrah*, 4(2), 171–186.
- Zainal, Yuyun, Islah. 2021. Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim Di Solo. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 107–127.
- Kopong, Kristoforus. 2021. Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 6(1), 23–32.
- Rosad. 2019. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173.
- Yuliani, Nur, Nafisah, Dewi, Furi. 2021. Implementasi Nilai Karakter Toleransi Dalam Pembelajaran Pkn, 8(2), 143–152.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Ismail. 2014. *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Yulianti. 2021. Penanaman Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 60–70.
- Nurgiansah, Muchtar. 2018. Development of Student Awareness through Student Learning Model Jurisprudential in Citizenship Education. *Atlantis Press*, 251(Acec), 670–674.
- Telaumbanua, Fatolosa. 2019. Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis E-Learning, 62, 14–23.
- Mahfud, Chairul. 2010. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hatimah, Ihat. 2008. *Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan*, Jakarta, Universitas terbuka.
- Tutiasri, Ririn. 2016. Komunikasi dalam Komunikasi Kelompok. *Jurnal Channel*, Vol. 4, No. 1, 81–90.
- Saifudin. 2019. Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme dan Ekstremisme di Indonesia. *Jurnal Aqlam*, Vol. 4, No. 1, 118–133.
- Gumgum, Justito, Nunik. 2017. Literasi Media: Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu Oleh Siswa SMA. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 35–40.
- Sumanto. 2018. Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *Maarif Institute*, Vol. 13, No. 2, 43–54.
- Nurainun, Vita. 2019. Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta. *Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 1, 89–97.
- Mokodenseho, Wekke. 2017. Toleransi Beragama dan Pembelajaran Agama Islam. *Prosiding Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 67–75.
- Liliweri, Alo. 2007. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Amir, Andy. 2018. Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pancasila. *Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 52–62.
- Liliweri. 2011. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.